

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 2021 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

*Disusun dan dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas
Akademik dan Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ANNISA RAHMADHANI

01970425251

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN

SYARIF KASIM RIAU

2022



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANNISA RAHMADHANI
NIM : 01970425251
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN
 TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN
 2021 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
 JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 30 Juni 2022

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING

FEBRI RAHMI, S.E, M.Sc.Ak

NIP. 19720209 200604 2 002

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP.19700826 199903 2 001

Dr. Hj. Hariza Hasvim, SE, M.Si

NIP.19760910 200901 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Annisa Rahmadhani
 NIM : 01970425251
 Jurusan : Diploma III Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi
 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun
 2021 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
 Perbendaharaan Provinsi Riau
 Tanggal Ujian : 30 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Dony Martias, SE, MM
 NIP. 19760306 200710 1 004

Sekretaris

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
 NIP. 19810817 200604 2 007

Penguji I

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
 NIP. 19791010 200710 2 011

Penguji II

Sonia Sischa Eka Putri, M.Ak
 NIP. 19940917 201903 2 024



Lampiran Surat :
 Nomor :
 Tanggal :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rahmadhani
 NIM : 01970425251
 Tempat Tgl. Lahir : Pekanbaru, 16 Desember 2000
 Fakultas Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D3 Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 pada kantor wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2022



Annisa Rahmadhani
 NIM : 01970425251

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 2021 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

OLEH:

ANNISA RAHMADHANI
01970425251

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan mewawancarai Bendahara di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, pertanggungjawaban anggaran (APBN)) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi masih diperlukan latihan bagi perangkat lain yang terlibat. Pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh Tim UAKPA/UAKPB dan sebagai pengawas sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBN*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabilalamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya serta Shalawat beserta salam selalu tucurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: **“Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau”**.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku penyusunan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulisan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam mendorong dan membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir (TA), untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih khususnya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda Apriwandi dan Ibunda Eni Novia, yang senantiasa memberikan Do'a restunya, motivasi, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
4. Ibu Dr. Hariza, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi D-III Akuntansi, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Febri Rahmi, S.E, M.Sc, Ak, CA, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi D-III Akuntansi dan juga dosen Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penuli dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
7. Bapak Rusdi Z, S.E sebagai bendahara di Kanwil dan seluruh Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan.
8. Kepada adik penulis, Nola Nabila, Muhammad Rohit, Muhammad Arif, Syabila Melfiani, yang senantiasa memberikan dukungan serta mengirim doa sehingga selesainya tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Buat sahabat seperjuangan, Ade, Novia, Selvi, Rivaldy, Rahman, dan Aldy seluruh mahasiswa/i Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2019.
10. Kepada Kak Dea, Kak Putri, dan Kak Zakiya yang selalu memberikan dukungan dan membantu kepada penulis dalam mengerjakan Tugas akhir.
11. Putri Nabila, Aulia, Annuriyah, Denisyia, Tya, Sekar, Igus terimakasih telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
12. Terimakasih kepada calon suami ku tercinta Agung Prayoga Pria hebat, motivator pribadi, yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja keras.

Penulis hanya bisa mendo'akan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis, semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Penulis

Annisa Rahmadhani
01970425251



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.4.2 Jenis dan Sumber Data.....	8
1.5 Metode Pengumpulan Data	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KANWIL DJPb PROVINSI RIAU.....	11
2.1 Sejarah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau.....	10
2.2 Visi dan Misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau	13
2.3 Struktur Organisasi.....	13
2.4 Tugas dan Wewenang.....	15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	23
3.1 Tinjauan Teori	25
3.1.1 Pengertian Keuangan Negara	25
3.1.2 Pengertian Anggaran.....	27
3.1.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN)	29
3.1.4 Penganggaran Sektor Publik.....	30
3.1.4.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik	30
3.1.4.2 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik.....	31
3.1.4.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik.....	32
3.1.4.4 Proses penyusunan Anggaran Sektor Publik	33
3.1.5 Akuntabilitas.....	34
3.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas	34
3.1.5.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	38
3.1.5.3 Prinsip Akuntabilitas.....	39
3.1.5.4 Dimensi Akuntabilitas.....	40
3.1.6 Transparansi.....	43
3.1.6.1 Pengertian Transparansi.....	43
3.1.6.2 Karakteristik Transparansi	45
3.1.6.3 Indikator Transparansi	46
3.1.7 Realisasi	47
3.1.8 Penyusunan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN)	48
3.1.9 Anggaran dalam Pandangan Islam	52
3.2 Tinjauan Praktek.....	54
3.2.1 Akuntabilitas.....	55

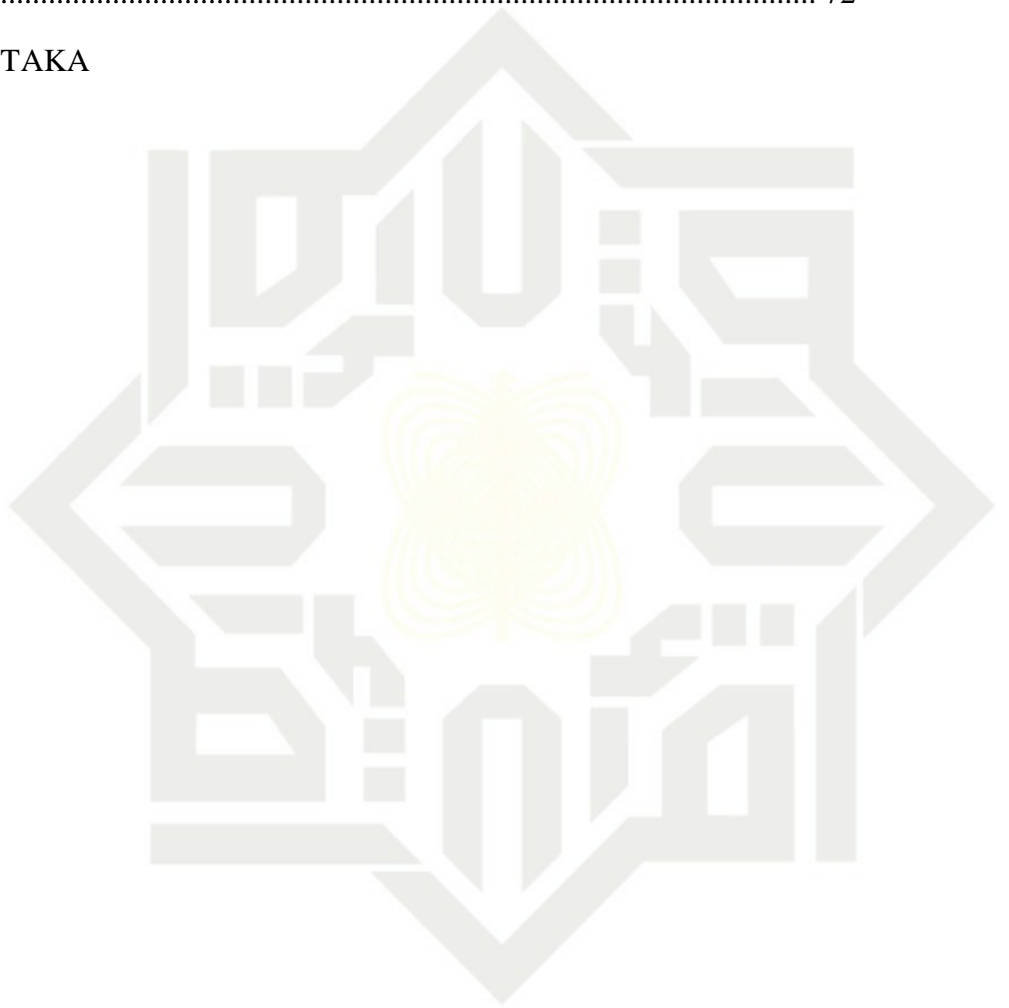
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Transparansi.....	64
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.....	70
-----------	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Riau 14



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Lembaran Panduan Wawancara
- Lampiran 3 Foto Kanwil DJPb dan dokumentasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah sekarang berlomba-lomba untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Karena tuntutan dari masyarakat semakin mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan yang kedepannya lebih baik, demi mewujudkan pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih. Hal ini biasanya disebut dengan *good governance*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan Transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nordiawan, dkk, 2012:123).

Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu system akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Lestari,2014). Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penerapan *good governance* ditujukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsep *good governance* semakin diisyaratkan untuk dilaksanakan pemerintah seiring dengan adanya reformasi yang menumbuhkan otonomi daerah (Amelia dkk., 2013).

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informasi keuangan pemerintah merupakan perangkat yang diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis, salah satu diantaranya adalah laporan keuangan berkaitan dengan tanggungjawab mengenai pelaksanaan rencana keuangan untuk disampaikan kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan/Rakyat. Perangkat yang diperlukan adalah laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ada dua jenis informasi keuangan yang lazim dibuat untuk pertanggungjawaban keuangan. Maka dalam melakukan penyusunan laporan keuangan harus memahami konsep penyusunan laporan keuangan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan benar dan tepat. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar yang dipakai dalam SAP akan berdampak pada opini yang diberikan auditor (dalam hal ini BPK) terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Kegiatan tersebut juga harus diiringi dengan adanya peningkatan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



APBN merupakan instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran serta kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan ke dalam APBN.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai amanat Pasal 23 Bab VIII UUD 1945, keuangan negara harus diatur dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara. Amanat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Ada pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan yang lainnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum Negara bertugas untuk mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Dalam pelaksanaan pemerintah tersebut dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas dan transparansi.

Kemudian penulis menemukan masalah dalam proses pelaporan yaitu Manajer Advokasi FITRA Riau mengatakan, bahwa pengelolaan keuangan daerah Riau telah mengalami kerugian pada negara sebesar Rp 46,6 miliar. Infoanggaran.com (2020)

Penyebab pertama, terjadinya kerugian karena mengalami kekurangan volume pekerjaan fisik dan spesifikasi teknis dalam pengadaan barang jasa sehingga perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, Pemerintah daerah tidak serius dengan melakukan perbaikan kinerja keuangan sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Penyebab kedua, mengalami kekurangan yang mengakibatkan penerimaan daerah tidak dipungut sehingga tidak disetorkan sebagai pendapatan daerah. Maka pemerintah tidak dapat memanfaatkan anggaran tersebut yang sebesar (Rp27,5 miliar) untuk membiayai pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Taufik ingin pemerintah daerah di Riau bisa memperbaiki kinerja keuangan kedepannya, sehingga tidak terjadi kerugian negara yang dapat berakibatkan pada indikasi korupsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyebab ketiga, ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah ketidakpatuhan terhadap perundang-undang yang mengakibatkan pada kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan juga ditemukan adanya administrasi yang tidak menimbulkan dampak finansial. Riaupos.co (2020)

Faktor yang mendukung penulis melakukan penelitian dengan mengenai Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara di Riau karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan Akuntabilitas penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kemudian Transparansi keterbukaan dan kejujuran dalam mengelola anggaran pendapatan belanja negara yang terdapat di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga pengelola diharapkan dapat mempertanggungjawabkan dan keterbukaan dalam mengelola APBN.

Penelitian ini diharapkan nantinya akan berdampak pula pada penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan APBN yang semakin efektif dan efisien di Riau agar mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi negara akuntabilitas dan transparansi, memperkuat negara dan memajukan perekonomian dan juga dapat mengurangi *fraud* dan tidak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur, terbuka dan jelas.

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “**Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau**”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat membuat perumusan masalah penelitian, yaitu: “Bagaimana penerapan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2021?”

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tentang penerapan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Instansi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan instansi dan membantu dalam mengambil keputusan untuk masalah yang dihadapi.

- b. Bagi Akademisi

Hasil ini dapat dijadikan pengetahuan sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam penelitian berikutnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No.249 Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Data primer juga disebut data yang asli. Data tersebut berupa wawancara mendalam tentang Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Kanwil Perbendaharaan dengan pegawai di bidang bagian umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan disajikan oleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang sudah jadi seperti sejarah umum dan struktur organisasi, laporan keuangan, deskripsi jabatan dan pembagian masing-masing tugas dan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 2 bagian sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai pegawai dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir.



2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau seperti Laporan Keuangan UAKPA/ UAKPB.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terbagi bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas gambaran umum mengenai tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan membahas gambaran umum mengenai keadaan perusahaan seperti sejarah dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yaitu sejarah instansi, visi dan misi, dan struktur organisasi, tugas dan wewenang dan uraian tugas struktural instansi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini menguraikan teori yang terkait dengan judul penelitian yang penulis bahas seperti pengertian keuangan negara, pengertian anggaran, anggaran pendapatan belanja negara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah negara, anggaran dalam pandangan islam dan tinjauan praktek yang terjadi di instansi.

: PENUTUP

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan yang dirangkum dari hasil penelitian dan saran yang diajukan bagi instansi sebagai upaya untuk menunjang kemajuan instansi dimasa yang akan datang.

BAB IV

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

GAMBARAN UMUM KANWIL DJPb PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, yaitu disebut Kanwil DJPBN Provinsi Riau, didirikan pada bulan April 1999 bergabung oleh Kanwil Sumatera Barat. Sebelumnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini bernama Kanwil IV. Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Pemerintah pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang di tandai dengan lahirnya paket undang-undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan dengan menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian keuangan selaku institusi pengelola fiskal.

Selaku institusi pengelolaan fiskal, Kementerian keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi(reorganisasi) dengan terbentuknya 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), dan badan Pengkajian ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Internasional (BAPEKKI). Suatu perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam suatu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama tersebar di berbagai unit.

Ditjen Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. Fungsi utamanya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri yang berada dibawah unit eselon I DJA. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan Eselon II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35,36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi Perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat Teknis pada Kantor pusat serta 33 Kanwil DJPBN dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada Kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pada bulan Oktober 2004 pun menjadi titik awal sinergi organisasi baru tersebut. Sehingga, telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat Eselon II dan jajaran di bawahnya. Selanjutnya, dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Wilayah Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPBN mempunyai tugas dan fungsi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.2 Visi dan Misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau

1. Visi

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”

2. Misi

Adapun Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah:

- a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal.
- b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel.
- c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
- d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang handal, profesional, dan modern.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang penggarisan atau penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur

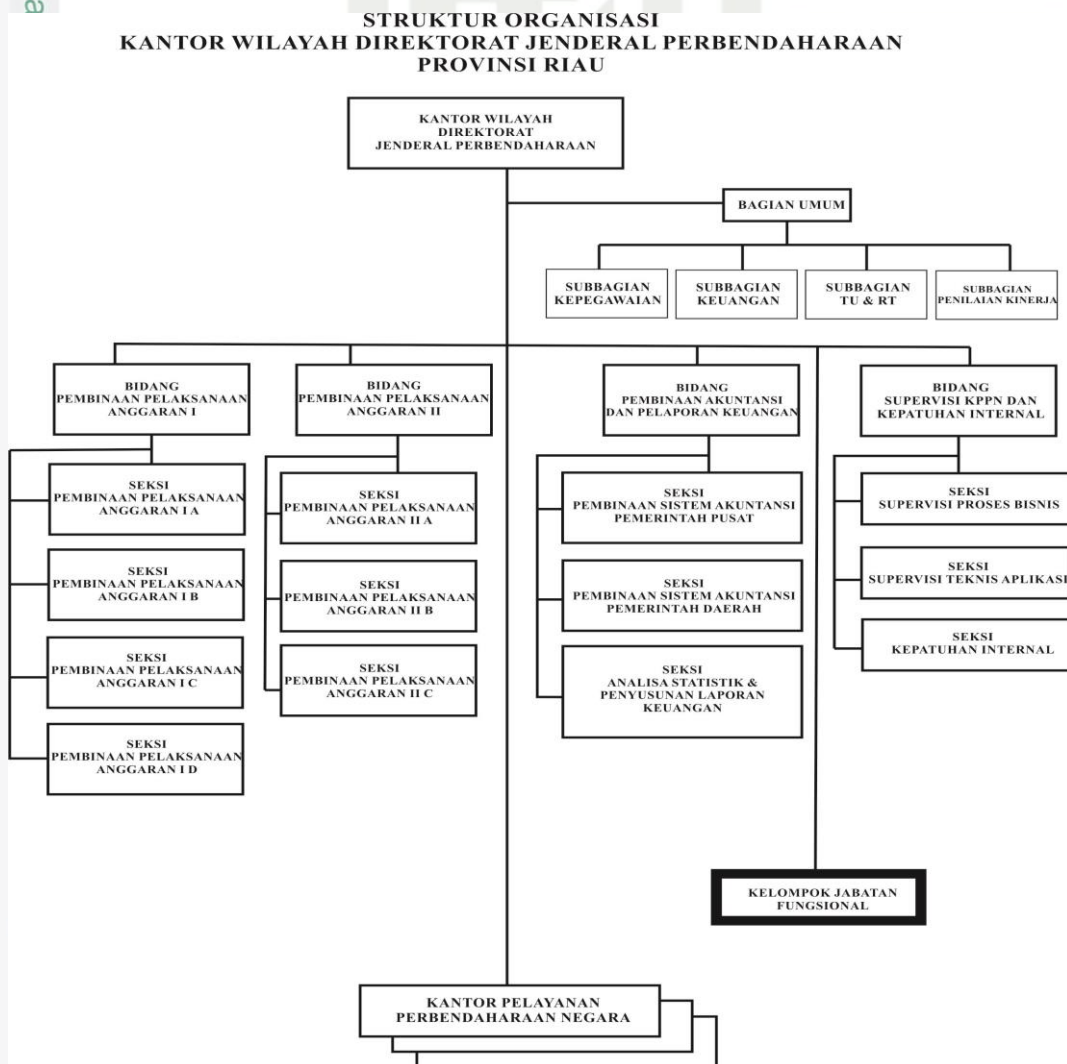
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

organisasi terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang yang didalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan di dalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berbentuk staff dan lini. Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berikut ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Riau



Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Tugas dan Wewenang

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dipimpin oleh kepala kantor dan dibantu oleh bagian umum dan seluruh bidang. Untuk lebih rincinya tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan terdiri atas:

1. Kepala kantor

Pemimpin serta penanggung jawab, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua bidang supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tercapainya tujuan kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi
2. Pembinaan
3. Supervise
4. Asistensi
5. Bimbingan teknis
6. Dukungan teknis
7. Monitoring
8. Evaluasi
9. Analisis kajian
10. Penyusunan laporan
11. Pertanggungjawaban dibidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PSDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kehumasan, keterbukaan informasi publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.

Bagian Umum memiliki beberapa subbagian yaitu:

a. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dan pengembangan sumber daya manusia.

b. Subbagian keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan RKAKL, urusan kebendaharaan, pengujian SPP dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan laporan kegiatan, pengadaan barang, dan jasa, pembuatan komitmen, pengujian tagihan, pengajuan permintaan pembayaran, perlengkapan dan rumah tangga, urusan tata usaha, kehumasan, protokoler pimpinan, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta kompilasi dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Subbagian Penilaian Kinerja Subbagian

Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja, pemantauan, penilaian, evaluasi dan pelaporan kinerja.

3. Bidang Pembina Pelaksanaan Anggaran I

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A, I B, I C, dan I D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengesahan revisi DIPA, pembinaan dan pembimbing teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, pengelolaan keuangan BLU dan manajemen investasi, monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dan pelaksanaan 19 anggaran pemerintah pusat, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan realisasi penggunaan dana transfer, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas pembinaan. Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran seksi I menyelenggarakan fungsi:

- a. Kompilasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kas daerah.
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU daerah.
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen dan monitoring dan evaluasi investasi daerah.
- g. Penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran belanja dan pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam rangka Spending Reviu.
- h. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer.
- i. Fasilitas penyiapan informasi keuangan daerah, dan
- j. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah.

4. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan Kajian Fiskal Regional;
- b. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah;
- c. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dana transfer di daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran daerah;
- h. Pengoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
- i. Pengoordinasian pelaksanaan layanan Kementerian Keuangan di daerah.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A
- b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B
- c. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seksi Pembinaan Pelaksanaan anggaran II A, II B, dan II C masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional, melakukan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pelaksanaan anggaran belanja daerah, investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, melakukan monitoring dan evaluasi dana transfer, investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, melakukan koordinasi pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta melakukan analisis dan penyusunan laporan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah yang pembagian tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rekonsiliasi, monitoring, dan evaluasi, penyusunan koordinasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (PUSAP), dan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan Government Finance Statistics (GFS), serta analisa atau laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pusat.
- b. Meyiapkan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implikasi standar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntansi pemerintah pada instansi.

- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah daerah.
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi daerah.
- e. Penyelenggaraan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-W).
- f. Konsolidasi LKPP tingkat unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-W).
- g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan LKPP tingkat kuasa BUN.
- h. Penyiapan bahan penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (GFS), dan
- i. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi Pembinaan System Akuntansi Pemerintah Pusat Seksi pembinaan system akuntansi pemerintah pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat.
- b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Seksi pembinaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem akuntansi pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi daerah.

- c. Seksi Analisis, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan Seksi analisis, statistik, dan penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, penyusunan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan LKPP Tingkat kuasa BUN, penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum system akuntansi pemerintah (PUSAP), dan menyusun statistik keuangan pemerintah sesuai dengan Government Finance Statistics, serta analisis atau laporan keuangan.

6. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis orasional aplikasi pada KPPN penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, bidang supervisi KPPN dan kepatuhan internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa bendahara umum negara pada KPPN
- b. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan
- c. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN
- d. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN
- e. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi aplikasi SPAN dan SAKTI
- f. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasional aplikasi SPAN dan SAKTI
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan kantor wilayah
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor wilayah.

Adapun beberapa seksi di Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal yaitu:

- a. Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi supervisi proses bisnis mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN.
- b. Seksi Supervisi Teknis Seksi supervisi teknis aplikasi mempunyai tugas

melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standarisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN.

- c. Seksi Kepatuhan Internal Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021, dapat di ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah menerapkan akuntabilitas. Bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara, khususnya pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pemerintah kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah menerapkan transparansi. Yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2.2 Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam mengimplementasikan melalui program Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang diperlukan adanya monitoring dan evaluasi khususnya selaku Tim UAKPA/UAKPB dalam mengelola keuangan negara.
2. Diharapkan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar.
3. Diharapkan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mempertahankan kinerja keuangan instansi yang dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 18.
- Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 38
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2017. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Amelia, Ira, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2013. *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan)*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru. Hal 1-15.pdf.
- Bastian, Indra. 2013. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi Utari dkk. 2016. *Akuntansi Manajemen, Edisi Keempat*: Mitra Wacana Media, Jakarta, Hal. 185.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, Ayu Komang D; dkk. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kututambahan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah)*. E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2. Nomor 1.
- Lestari. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kota Bandung*. Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Nafarin. 2012. *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muindro, Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nordiawan, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. 2016. *Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110-126 <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>.
- Rusdiana, A. and Nasihudin, Nasihudin (2018) *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung: ISBN 978-602-5823-04-6.
- Taufik. 2020. *Fitra Riau temukan dugaan kerugian Negara Rp46,6M*. Dikutip dari media (Online) : <https://riaupos.jawapos.com>.
- Taufik. 2020. *Pengelolaan keuangan Daerah di Riau rugikan Negara Rp46,6M*. Dikutip dari media (Online) : <https://infoanggaran.com>.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 249, PEKANBARU 28116; TELEPON (0761) 22686; FAKSIMILI (0761) 22647; SUREL : KANWILDJPBRIAU@KEMENKEU.GO.ID; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/RIAU

Nomor : S-970/WPB.04/2022
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 09 Juni 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/1427/2022 Tanggal 25 Februari 2022 perihal pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan Skripsi dengan ini Kepala Bagian Umum atas nama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau telah menerima izin Riset Penelitian kepada :

Nama : Annisa Rahmadhani
NIM : 01970425251
Jurusan : D-III Akuntansi
Semester : VI (Enam)

Dengan Judul Penelitian :

“ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 2021 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU”

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau
Kepala Bagian Umum



Muhammad Indra Kesuma

Lampiran 3: Foto Kanwil DJPb dan Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 249, PEKANBARU 28116, TELEPON (0761) 22686, FAKSIMILI (0761) 22647, SUREL: KANWILDJPBRIAU@KEMENKEU.GO.ID, SITUS: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/RIAU

Nomor : S-970/WPB.04/2022
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 09 Juni 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/1427/2022 Tanggal 25 Februari 2022 perihal pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan Skripsi dengan ini Kepala Bagian Umum atas nama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau telah menerima izin Riset

Penelitian kepada :

Nama : Annisa Rahmadhani
NIM : 01970425251
Jurusan : D-III Akuntansi
Semester : VI (Enam)
Dengan Judul Penelitian :

"ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TAHUN 2021 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU"

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau
Kepala Bagian Umum



Muhammad Indra Kesuma



LAMPIRAN WAWANCARA

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Lampiran 2 : Lembaran Panduan Wawancara

**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
 PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
 PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU”**

Informan : Rusdi Z, S.E

Jabatan : Bendahara bidang Umum

Tempat : Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

Tanggal : 06 Juni 2022

Waktu : 11.00

1. Apakah informasi laporan keuangan disajikan dengan tepat waktu?

Jawab:

Iya, harus tepat waktu karena sudah ada time schedule ditentukan. Karena ada penilaian dari pusat.

2. Apakah informasi laporan keuangan sudah disesuaikan dengan stakeholders?

Jawab:

Iya sudah stakeholders, informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan terkait dengan internal atau kantor.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah informasi laporan keuangan sudah disajikan dengan jelas dan akurat?

Jawab:

Iya harus jelas dan akurat, laporan keuangan harus dibuat dengan jelas supaya setiap orang membaca bisa dimengerti dengan penjelasan-penjelasan.

4. Apakah informasi laporan keuangan tersebut mudah diakses dan mudah dipahami?

Jawab:

Mudah di akses, karena laporan keuangan ini dibuat untuk internal dan eksternal. Jadi laporan keuangan harus dibuat dengan jelas. Dan mudah dipahami laporan keuangan tersebut.

5. Siapakah yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban APBN di instansi?

Jawab:

Yang membuat laporan keuangan yaitu tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) / Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang terdiri oleh penanggungjawab, koordinator, ketua, dan anggota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Apakah dalam menggunakan dana publik harus dilakukan mendapatkan otoritas?

Jawab:

Dalam menggunakan anggaran ini harus ada persetujuan yang terlibat untuk mendapatkan otoritas. Oleh karena itu harus terbuka dalam menggunakan anggaran tersebut.

7. Apakah instansi menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif?

Jawab:

Iya dalam menggunakan uang publik harus ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk mencapai output sebanyak-banyaknya jadi tidak yang dihaburkan. Ketika menggunakan anggaran sedikit tetapi outputnya lebih banyak itu lebih bagus.

8. Apakah dilaporkan tujuan program instansi ke publik?

Jawab:

Iya dilaporkan, karena program tersebut untuk internal dan eksternal publik, maka harus tau program yang dilaksanakan dan output yang dicapai.

9. Apakah terdapat kebocoran atau pemborosan dana APBN pada instansi?

Jawab:

Tidak dapat kebocoran dan pemborosan, karena dalam menggunakan APBN harus selektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apakah instansi dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan?

Jawab:

Iya dapat dipertanggungjawabkan. Semua sudah dilaksanakan maka sebaik-baiknya harus di pertanggungjawabkan.

11. Apakah instansi sudah melaksanakan program-program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ?

Jawab:

Iya program-program tersebut sudah dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan program-program, maka terbangkalai program tersebut dan output tidak dapat dicapai.

12. Apakah instansi telah mempertimbangkan program dengan hasil optimal dan biaya minimal?

Jawab:

Iya, tentu sudah dipertimbangkan program tersebut dengan hasil optimal dan biaya minimal.

13. Apakah tujuan program yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak?

Jawab:

Dalam melaksanakan program tersebut maka harus tercapai, Oleh karena itu jika tidak dicapai maka masyarakat akan terkena dampaknya. Seharusnya memang harus dipertanggungjawabkan karena sudah kewajiban untuk dilaksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Apakah instansi menentukan tujuan, sasaran, stakeholders dalam menetapkan kebijakan?

Jawab:

Iya, harus tujuannya ditentukan dulu, sasarannya apa, jumlah stakeholdersnya berapa. Kemudian dilakukan kebijakan.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Bendahara



Rusdi Z, S.E

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

ANNISA RAHMADHANI, lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2000. Anak pertama dari Lima bersaudara, dari pasangan Apriwandi dan Eni Novia. Penulis memulai pendidikan di MI Al- Ikhwan Pekanbaru, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013 di SMPN 26 Pekanbaru. Melanjutkan pendidikan SMK Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaru pada tahun 2016. Pada tahun 2019 penulis lulus dari SMK Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaru, kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan program studi Diploma-3 (D3) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebagai Mahasiswa pada jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas pada bulan Mei-Juni 2022 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dengan judul “Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau”. Penulis dapat menyelesaikan studi selama 2 tahun 10 bulan. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 30 Zulhijah tahun 1443H/ 30 Juni 2022 M dengan IPK 3,50 berhak menyandang gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak).